

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN- PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Tipe Penelitian.....	11
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13

1.7 Analisis Bahan Hukum	14
1.8 Sistematika Penulisan	14

BAB II BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 15

2.1 Sejarah Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem Pemerintahan Indonesia	16
2.2 Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	21
2.3 Proses Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa	28
2.4 Akibat hukum tidak terpenuhinya prosedur pemilihan BPD dengan Peraturan perundang-undangan.....	33

BAB III MEKANISME HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH

**CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
YANG DIRUGIKAN DALAM PROSES PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA 33**

3.1 Hak dan kewajiban calon anggota BPD dalam proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa	33
3.2 Mekanisme Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Calon Anggota BPD yang Dirugikan dalam Proses Pemilihan BPD.....	37
3.2.1 Mekanisme Hukum dalam Hukum Administrasi.....	38
3.2.2 Mekanisme Hukum dalam Hukum Perdata	48
3.2.3 Mekanisme Hukum dalam Hukum Pidana.....	52

3.3 Upaya calon anggota BPD yang dirugikan dalam proses pemilihan anggota BPD melalui musyawarah	54
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR BACAAN	xvi

DAFTAR PERATURAN- PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)